

KONFLIK DAN PLURALITAS AKTOR DALAM DESAIN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN WADUK LAMBO DI KABUPATEN NAGEKEO,
NUSA TENGGARA TIMUR



Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Zaenuddin, S. Pd**
NIM : 18200010250
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

10000
METERAI
TEMPEL
DDFFAJX195930386


Zaenuddin, S. Pd
NIM: 18200010250

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Zaenuddin, S. Pd**
NIM : 18200010250
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Saya yang menyatakan,


Zaenuddin, S. Pd
NIM: 18200010250



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-315/Un.02/DPPs/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : KONFLIK DAN PLURALITAS AKTOR DALAM DESAIN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WADUK LAMBO DI KABUPATEN NAGEKEO, NUSA TENGGARA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAENUDDIN, S. Pd.
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010250
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 61272239d082f



Pengaji II

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6126ef953c42d



Pengaji III

Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 60dcffff9b58e



Yogyakarta, 25 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6128487c653a7

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul

**: KONFLIK DAN PLURALITAS AKTOR DALAM
DESAIN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WADUK
LAMBO DI KABUPATEN NAGEKEO,
NUSA TENGGARA TIMUR**

Nama : Zaenuddin, S. Pd
NIM : 18200010250
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua Sidang/
Penguji I : **Dr. Subi Nur Isnaini**
NIP: 19860818 201903 2 010

Penguji II : **Ahmad Norma Permata, S. Ag., M.A., Ph.D.**
NIP: 19711207 200901 1 003

Penguji III : **Najib Kailani, S. Fil. I., M.A., Ph. D**
NIP: 19780924 000000 1 301

Diuji di Yogyakarta pada hari Senin 28 Juni 2021

Waktu : **10.00 – 11.00 WIB**
Hasil : **A**
IPK : **3.81**
Predikat : **Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude***

*Coret yang tidak perlu.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

KONFLIK DAN PLURALITAS AKTOR DALAM DESAIN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WADUK LAMBO DI KABUPATEN NAGEKEO, NUSA TENGGARA TIMUR

Yang ditulis oleh :

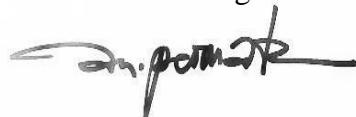
Nama	:	Zaenuddin, S. Pd
NIM	:	18200010250
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A)

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2021

Pembimbing



Ahmad Norma Permata, S. Ag., M. A., Ph. D
NIP: 19711207 200901 1 003



HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan Setulus Hati
Tesis Ini Saya Persembahkan Kepada
Almamater Tercinta
Program Pascasarjana
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia, rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagaimana yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga tetap teriring dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabat dan ummat yang senantiasa meneladani akhlaknya dan mengikuti risalah Islam yang dibawah olehnya sebagai ajaran yang haq lagi sempurna bagi manusia.

Penulisan tesis yang diberi judul **“Konflik dan Pluralitas Aktor dalam Desain Kebijakan Pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur”**, disusun oleh penulis dalam rangka menunaikan kewajiban tugas akhir dan untuk melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar **Master of Arts (M.A)** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

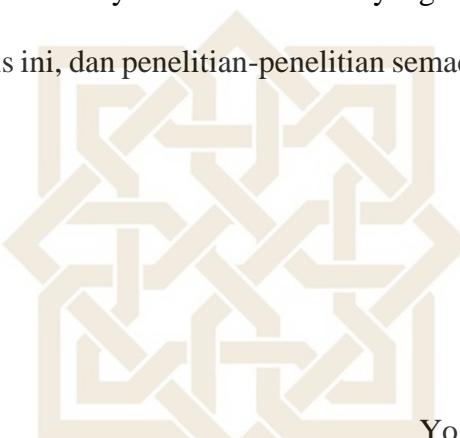
Dengan segala kesadaran dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi, baik dalam bentuk moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung, sehingga proses penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M. Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, S. S., M.A., selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, dan Bapak Najib Kailani, S. Fil. I., M.A., Ph. D., selaku sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies beserta segenap jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan baik selama proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Ahmad Norma Permata, S. Ag., M.A., Ph. D., selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dengan penuh tanggung jawab, dan memberikan kritikan, saran dan arahan serta memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
5. Bapak Marianus Waja, S.H., selaku Wakil Bupati Nagekeo yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan berbagai informasi kepada penulis, khususnya informasi yang berkaitan dengan pembangunan Waduk Lambo. Sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Najib Kailani, S. Fil.I., M.A., Ph. D., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
7. Segenap Dosen Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik sejak awal kuliah hingga pada tahap akhir penulisan tesis ini.

8. Pimpinan beserta seluruh karyawan/karyawati Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani penulis dengan sangat baik dan ramah dalam mencari berbagai sumber atau referensi penyusunan tesis.
9. Kepada kedua orangtua tercinta, Bapak H. Alimuddin, dan Ibu Hj. Siti Hasma yang telah mendidik, membimbing dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis, baik secara moral maupun spiritual. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang kepada keduanya. Beserta adik-adik saya dan seluruh keluarga yang telah mendukung dan mendo'akan dalam penulisan tesis ini.
10. Teman-teman perantauan dan seperjuangan akademik Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP) angkatan 2018 Semester Genap yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan selama berlangsungnya proses perkuliahan di kampus.
11. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian tesis ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Akhir kata, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini, baik dari aspek substansi pembahasan maupun tata bahasa yang jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini, dan penelitian-penelitian semacam ini di masa yang akan datang.



Yogyakarta, 10 Juni 2021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Zaenuddin. NIM. 18200010250. *Konflik dan Pluralitas Aktor dalam Desain Kebijakan Pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.* Tesis Program Pascasarjana Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. Pembimbing Tesis: Ahmad Norma Permata, S. Ag., M. A., Ph. D.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji desain kebijakan publik yang diformulasikan oleh pemerintah sebagai aparat birokrasi dalam rencana pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo yang menuai polemik, penolakan dan perlawanan masyarakat adat dan berujung pada terjadinya konflik sosial. Selain itu, penelitian ini hendak memotret tujuan kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dibalik tindak lanjut pembangunan Waduk Lambo yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengingat bahwa pembangunan waduk tersebut merupakan ranah dan otoritas pemerintah daerah yang ditentang masyarakat adat sejak tahun 2000 silam, akan tetapi kewenangannya kemudian dialihkan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Untuk menginterpretasikan permasalahan di atas, penelitian ini mengadopsi teori Birokrasi Rasional yang dikembangkan oleh Max Weber sebagai rumusan konseptual dalam melihat fenomena birokrasi, dan rantai otoritas serta model desain kebijakan publik yang diimplementasikan oleh aparat birokrat. Sedangkan pendekatan kebijakan pluralis Robert Dahl digunakan untuk memetakan kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam proses kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan objek penelitian mengenai desain kebijakan dan interaksi kelompok kepentingan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan berbagai aktor politik, observasi lapangan dan dokumentasi pembangunan waduk. Pemilihan responden sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* sesuai dengan kriteria yang relevan dengan penelitian.

Hasil dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa model desain kebijakan rasional-komprehensif yang diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo cenderung kaku dan tidak fleksibel dalam merespon gejolak penolakan masyarakat adat. Hal inilah yang menjadi pemicu dan akar terjadinya konflik sosial di masyarakat. Pertentangan kepentingan antar kelompok di atas dipetakan menjadi dua bagian. *Pertama*, masyarakat adat terdampak pembangunan. Tuntutan dan kepentingan masyarakat adat ialah mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar calon lokasi pembangunan Waduk Lambo dapat dialihkan dari tanah ulayat mereka dan dibangun pada lokasi yang telah disetujui oleh masyarakat adat, yakni di kawasan Lowophebu dan Malawaka. Adapun manuver yang digunakan oleh masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka adalah dengan menggandeng Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga agar dapat mempengaruhi pemerintah pusat dalam proses kebijakan.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Kepentingan pemerintah daerah adalah menindaklanjuti rencana pembangunan Waduk Lambo agar dapat segera dieksekusi. Manuver yang dilakukan adalah dengan mengalihkan kewenangan pembangunan Waduk Lambo melalui surat yang ditujukan kepada pemerintah pusat bahwa pembangunan Waduk Lambo telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011. Sehingga pemerintah pusat merespon dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional yang di dalamnya mencantumkan bahwa pembangunan Waduk Lambo merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kata Kunci: Konflik Waduk Lambo; Kebijakan Rasional; Masyarakat Adat; Pluralitas Aktor; Kabupaten Nagekeo



ABSTRACT

Zaenuddin. NIM. 18200010250. *Conflict and Plurality of Actors in The Policy Design of Lambo Reservoir Development in Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara.* Thesis of the Postgraduate Program of Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Concentration of Islamic Development and Public Policy (IPKP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. Thesis Advisor: Ahmad Norma Permata, S. Ag., M. A., Ph. D.

This research aims to review the design of public policies formulated by the government as a bureaucratic apparatus in the development plan of the Lambo Reservoir in Nagekeo Regency that reaps polemics, rejection and resistance from indigenous peoples and leads to social conflicts. In addition, this research aims to capture the objectives of the interest groups involved behind the follow-up to the development of the Lambo Reservoir which has been established by the central government as one of the National Strategic Projects (PSN). Given that the construction of the reservoir is the domain and authority of the local government that is opposed by the indigenous peoples since 2000, but the authority is then transferred from the local government to the central government.

To interpret the above problems, this research adopted the theory of Rational Bureaucracy developed by Max Weber as a conceptual formulation in looking at bureaucratic phenomena, and the chain of authority and design model of public policy implemented by bureaucratic. Meanwhile, Robert Dahl's pluralist policy approach was used to map out the interest groups involved in the policy process. This research uses a case study method with qualitative approach and includes field research type with research object on policy design and interest group interaction. The data collection techniques used are in-depth interviews with various political actors, field observations and documentation of reservoir construction. The selection of respondents as a source of research data using purposive sampling techniques and snowball sampling in accordance with the criteria relevant to the study.

The results of this research show that the rational-comprehensive policy design model adopted by the Nagekeo Regency Government tends to be rigid and inflexible in responding to the upheaval of indigenous people's rejection. This is the trigger and the root of social conflict in society. Conflicts of interest between the above groups are mapped into two parts. First, indigenous peoples are affected by development. The demands and interests of indigenous peoples are urging the local government and the central government so that prospective Lambo Reservoir construction sites can be diverted from their ulayat land and built on location that have been approved by indigenous peoples, namely in the Lowophebu and Malawaka areas. The maneuvers used by indigenous peoples in fighting for their rights are by cooperating with the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN) Nusa Bunga in order to influence the central government in the policy process.

Second, the Nagekeo Regency Government. The interest of the local government is to follow up on the lambo reservoir development plan so that it can be executed immediately. The maneuver is to transfer the authority of Lambo Reservoir development through a letter addressed to the central government that the construction of Lambo Reservoir has been in accordance with the Spatial and Regional Plan of Nagekeo Regency, as stated in Nagekeo District Regulation No. 1 of 2011. So, that the central government responded by issuing Presidential Regulation No. 3 of 2016 on The Acceleration of Implementation of National Strategy Projects in which it states that the construction of Lambo Reservoir is one of the National Strategic Projects (PSN).

Keywords: Lambo Reservoir Conflict; Rational Policy; Indigenous Peoples; Plurality of Actors; Nagekeo Regency



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENEGERESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vii
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	12
1. Teoretis.....	12
2. Praktis	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Desain Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	26
4. Teknik Pengumpulan Data	29
5. Teknik Keabsahan Data	32
6. Teknik Analisis Data.....	33

G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II TINJAUAN KONSEP BIROKRASI, KEBIJAKAN PUBLIK DAN KONFLIK DALAM BACAAN LITERATUR	
A. Konsepsi Birokrasi.....	38
1. Telaah Birokrasi.....	38
2. Birokrasi Weberian.....	42
3. Fungsi Birokrasi.....	55
B. Desain dan Analisa Kebijakan Publik	60
1. Paradigma Kebijakan Publik	61
2. Model Rasional-Komprehensif	63
3. Model inkremental	71
4. Analisa Pendekatan Kebijakan Pluralis	77
C. Genealogi Konflik	85
1. Pengertian Konflik	85
2. Anatomi Konflik.....	86
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN DAN POTRET KEBIJAKAN SERTA KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN WADUK LAMBO	
A. Profil Desa Rendubutowe	95
B. Data Demografi Desa Rendubutowe	99
C. Gambaran Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Rendubutowe	103
D. Deskripsi Rencana Pembangunan Waduk Lambo	104
E. Proses Kebijakan dalam Pembangunan Waduk Lambo	115
1. Narasi Dokumen dalam Perencanaan Implementasi Pembangunan Waduk Lambo	116
2. Kronologi Pelaksanaan Pembangunan Waduk Lambo...	120
F. Penolakan Masyarakat Adat.....	127
1. Latar Belakang dan Kronologi Penolakan	128

2. Poin-Poin Utama Tuntutan Masyarakat	130
BAB IV DESAIN KEBIJAKAN RASIONAL DAN PLURALITAS AKTOR DALAM KONFLIK PEMBANGUNAN WADUK LAMBO	
A. Realitas Desain Kebijakan Rasional-Komprehensif dalam Pembangunan Waduk Lambo	137
B. <i>Problem</i> Responsivitas Sebagai Pemicu Terjadinya Konflik Pembangunan Waduk Lambo	147
C. Potret Pluralitas Aktor: Persaingan Antara Pemerintah VS Masyarakat Adat	153
D. Kegagalan Rasionalitas dalam Desain Kebijakan Berisiko Konflik	159
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran	164

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan Desain Model Kebijakan Rasional dan Inkremental	78
Tabel 2 : Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan	99
Tabel 3 : Jumlah Sarana dan Fasilitas Publik	99
Tabel 4 : Data Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin...	100
Tabel 5 : Data Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Usia	101
Tabel 6 : Data Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Komponen Dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>)..	35
Gambar 2 : Model Rasional Kebijakan Publik	69
Gambar 3 : Peta Wilayah Administrasi Desa Rendubutowe	98
Gambar 4 : Lokasi Pembangunan Waduk Lambo	108
Gambar 5 : Sesi Diskusi Bersama Wakil Bupati Nagekeo	111
Gambar 6 : Sketsa Pembangunan Waduk Lambo	112
Gambar 7 : Peta Genangan Bendungan Mbay/Lambo	113
Gambar 8 : Infografis Bendungan Mbay/Lambo	113
Gambar 9 : Pengamanan Aparat Kepolisian Saat Proses	
PengukuranLahan	128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pembangunan merupakan suatu proses yang multidimensional dan identik dengan pertumbuhan dan perubahan, baik dalam struktur sosial maupun dalam tingkat ekonomi. Secara umum, esensi dari pembangunan adalah sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang sistematis, dan diinisiasi oleh para birokrat pemerintahan melalui kebijakan-kebijakan yang mengarah pada suatu perubahan agar dapat meningkatkan kesejahteraan serta memperbaiki kondisi sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembangunan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan atau tindakan membangun.¹ Terkait dengan konsep pembangunan, Effendi berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan sumber daya, yang dilakukan dengan sebuah perencanaan berkelanjutan agar tercapai suatu keadilan dan kesetaraan.² Dalam narasi yang lain, Todaro beranggapan bahwa pembangunan yang digalakkan oleh suatu negara mengerucut pada tiga aspek pokok, yakni kesejahteraan masyarakat, akses kegiatan perekonomian dan sosial, serta ketersediaan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat.³

¹ Arti Kata Pembangunan, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembangunan>, Diakses tanggal 30 November 2020.

² Bachtiar Effendi, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), 2.

³ Michael Paul Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Erlangga, 2004), 64.

Sedangkan menurut Katz (dalam Yuwono), pembangunan diartikan sebagai suatu usaha perubahan dari keadaan atau kondisi tertentu menuju keadaan yang lebih baik.¹ Dalam perspektif yang lain, Johan Galtung memberikan sebuah definisi bahwa pembangunan merupakan suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik dalam tataran individual ataupun kelompoknya, serta rangkaian dari seluruh proses pembangunan dilakukan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik kerusakan yang berdampak pada tatanan kehidupan sosial maupun kerusakan yang berdampak langsung terhadap alam.² Senada dengan Johan Galtung, Dissaynake berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang mengarah pada perubahan sosial dan kualitas hidup yang lebih baik, tanpa merusak lingkungan atau budaya serta kultur masyarakat setempat.³

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat diambil sebuah sintesis bahwa pembangunan mengharapkan adanya suatu perubahan yang lebih baik di dalam masyarakat, serta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, baik kesejahteraan sosial maupun ekonomi melalui pembangunan. Namun, yang menjadi titik penekanan dalam suatu pembangunan adalah tidak menimbulkan adanya kerusakan, utamanya kerusakan lingkungan dan kultur serta budaya masyarakat setempat yang terdampak pembangunan.

¹ Teguh Yuwono. *Manajemen Otonomi Daerah*. (Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (PUSKODAK) UNDIP, 2001), 47.

² Lambang Trijono. *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 3.

³ Zulkarimen Nasution. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 254.

Pembangunan terdiri dari dua bagian, yakni pembangunan fisik dan non-fisik.⁴ Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tampak oleh mata, seperti pembangunan infrastruktur dan prasarana yang meliputi fasilitas umum (jalan, jembatan, waduk/bendungan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain) dan fasilitas sosial (gedung sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain). Interpretasi dari pembangunan infrastruktur, telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 yang berbunyi bahwa infrastruktur merupakan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak, yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan baik.⁵ Adapun pembangunan non-fisik ialah pembangunan yang didasarkan pada dorongan keinginan masyarakat dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Pembangunan fisik berupa infrastruktur merupakan upaya pemerintah dalam memangkas disparitas atau kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan adanya pembangunan, baik di sektor ekonomi maupun sosial diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan dasar dan koneksi manusia. Sebagai sebuah lembaga negara, pemerintah memiliki mesin atau sistem manajerial yang disebut sebagai birokrasi. Adanya birokrasi memberikan wewenang atau

⁴ Mudrajad Kuncoro. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 20.

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 *Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur* Pasal 1 ayat (4)

otoritas penuh bagi para birokrat dalam membuat keputusan ataupun kebijakan. Salah satu fungsi utama dari birokrasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Andrew Heywood adalah sebagai pelaksana administrasi yang mengeksekusi serta mengimplementasikan undang-undang ataupun kebijakan negara.⁶ Lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 merupakan pintu masuk bagi para birokrat untuk merumuskan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan di sektor pembangunan infrastruktur. Sebab, ketersediaan sarana dan infrastruktur dapat mendongkrak peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu daerah.⁷

Namun, di dalam sebuah proses dan kegiatan pembangunan yang berlangsung, pemanfaatan sumber daya alam, terutama tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat terhindarkan. Khusus pada persoalan komoditas terhadap tanah, permasalahan tersebut kerap melahirkan konflik yang melibatkan warga atau kelompok masyarakat dengan kelompok berbadan hukum baik yang bersifat privat maupun publik. Hal tersebut dipengaruhi oleh penegasan status penguasaan tanah serta status kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Perkembangan konflik di sektor pertanahan terus mengalami perkembangan baik secara kualitas maupun kuantitas. Penyebabnya adalah karena luas tanah yang tetap, tidak mengalami perubahan, sementara jumlah populasi manusia yang memerlukan tanah untuk dapat memenuhi kebutuhannya, terus mengalami

⁶ Andrew Heywood, *Political Theory: An Introduction*. (London: Palgrave Macmillan, 2012), 112.

⁷ Novi Maryaningsih, Oki Hermansyah dan Myrnawati Savitri, “ Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 17, No. 1 (Juli 2014), 67

peningkatan dari waktu ke waktu. Pada satu sisi, masyarakat membutuhkan tanah atau lahan sebagai sumber penghidupan untuk dapat bertahan hidup. Namun, pada sisi yang lain, negara, swasta maupun korporasi memerlukan tanah untuk dapat membuka kegiatan perekonomian mereka dalam skala yang besar.⁸

Pemanfaatan tanah sebagai sumber daya di dalam pembangunan, seringkali kurang diperhatikan dan tidak diperhitungkan dampaknya terhadap keharmonisan ekologi, baik lingkungan alam maupun lingkungan manusia. Merespon fenomena ini, Sofian Effendi melihat bahwa hancurnya tatanan kehidupan manusia diakibatkan oleh dominasi proyek-proyek pembangunan yang berorientasi keuntungan material, sehingga kurang mempertimbangkan dan mengutamakan hal-hal yang menjadi kebutuhan psikologis kehidupan manusia.⁹ Dalam konteks tersebut, pembangunan yang seharusnya berfungsi sebagai sarana menggusur kemiskinan (*eradication of poverty*), bertransformasi menjadi senjata untuk menggusur dan mengekslusasi orang miskin (*eradication of the poor*).¹⁰

Faktor inilah yang menjadi penyebab serta pemicu lahirnya konflik sosial di dalam masyarakat. Akhirnya benturan kepentingan antara masyarakat yang menolak pembangunan dengan pemerintah yang merencanakan suatu

⁸ Bernhard Limbong. *Politik Pertanahan*. (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014), hlm. 69.

⁹ Agus Suryono. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), 5.

¹⁰ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 223

pembangunan, tidak dapat terhindarkan. Sumber utama yang melatarbelakangi benturan kepentingan tersebut ialah adanya ketidakadilan sosial serta diskriminasi terhadap hak-hak individu maupun kelompok.¹¹ Pro-kontra yang tajam dan intens dalam suatu pembangunan, tidak sedikit yang bermuara dan berujung pada konflik sosial.

Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan serta analisis terhadap kebijakan yang diformulasikan oleh para birokrat, terutama di sektor pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan dalam jumlah banyak. Apabila kebijakan yang dibuat memunculkan adanya penolakan publik serta pembangkangan yang berujung pada terjadinya konflik sosial, maka hal tersebut menjadi pertanda bahwa terdapat ketidakpuasan publik atas desain kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.¹² Artinya, pemerintah telah gagal mendesain kebijakan publik yang dapat mengantisipasi terjadinya konflik sosial.

Berdasarkan data dan laporan catatan akhir tahun yang dihimpun oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik sosial khususnya konflik agraria di sektor pembangunan infrastruktur, dalam kurun waktu lima tahun tahun terakhir (2015-2019) terjadi sebanyak 363 kasus. Rinciannya, tahun 2015 terjadi sebanyak 70 kasus. Tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah kasus yang signifikan, dibanding tahun sebelumnya, yakni 100 kasus. Tahun 2017,

¹¹ Brenda DuBois and Karla Krogssurd Miley. *Social Work: An Empowering Profession*. (Boston: Allyn and Bacon, 1992), 148

¹² Dwiyanto Indiahono, *PUBLIC DISOBEDIENCE: Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebojakan Pemerintah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), 135.

mengalami penurunan dengan jumlah 94 kasus. Tahun 2018 sebanyak 16 kasus. Dan tahun 2019 sebanyak 83 kasus.¹³ Khusus pada tahun 2019, lonjakan konflik di sektor pembangunan infrastruktur mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni 83 kasus, jika dibandingkan dengan akumulasi kasus pada tahun 2018 dengan jumlah 16 kasus.

Secara agregat, lonjakan konflik sosial di sektor pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 lalu, cukup signifikan. Perinciannya, fasilitas umum 28 kasus, fasilitas sosial 13 kasus, pembangunan jalan tol sebanyak 8 kasus, infrastruktur pariwisata 9 kasus, pembangunan bandara udara sebanyak 6 kasus, sektor kereta api 5 kasus, pembangunan pembangkit listrik sebanyak 5 kasus, pembangunan fasilitas negara atau pemerintah 5 kasus, dan konflik pembangunan waduk atau bendungan sebanyak 2 kasus. Penyebab lonjakannya adalah karena masih ada sisa dari beberapa Proyek Strategi Nasional (PSN) di tahun 2019 yang mulai memasuki tahap penyiapan dan pengadaan tanah untuk pembangunan.¹⁴

Salah satu proyek pembangunan infrastruktur di daerah yang mendapat penolakan dari masyarakat dan berujung pada terjadinya konflik sosial ialah rencana pembangunan Waduk Lambo yang terletak di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Proyek pembangunan Waduk Lambo merupakan

¹³ Laporan Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam <http://kpa.or.id/publikasi/daftar/laporan>, Diakses pada tanggal 29 November 2020.

¹⁴ Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria. “Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan”, 10.

program lanjutan dari Waduk Mbay¹⁵ yang sempat terkendala pembangunannya sejak tahun 2001. Kemudian pada tahun 2016, rencana pembangunan Waduk Lambo diusulkan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo kepada Pemerintah Pusat. Usulan tersebut lalu direspon oleh Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang menyebutkan bahwa pembangunan Waduk Lambo merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN)¹⁶ dan termasuk dari tujuh waduk yang akan dibangun di Kabupaten Nagekeo. Pembangunan Waduk Lambo ditujukan untuk memenuhi kebutuhan debit air dan sarana pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Nagekeo.

Namun, kebijakan pembangunan Waduk Lambo yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo mendapat penolakan dari masyarakat adat Rendu, Lambo dan Ndora di tiga desa yang terletak di kecamatan yang berbeda, yakni Desa Rendu Butowe di Kecamatan Aesesa, Desa Labolewa di Kecamatan Aesesa Selatan, dan Desa Ulupulu yang terletak di Kecamatan Nangaroro. Dasar penolakan tersebut adalah karena lokasi pembangunan waduk

¹⁵ Rencana pembangunan waduk yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Ngada pada waktu itu, masih bernama Waduk Mbay. Mbay merupakan kota kecamatan Aesesa yang termasuk dari salah satu 14 kecamatan di Kabupaten Ngada. Namun, pada tanggal 22 Mei 2007 terbentuklah Kabupaten Nagekeo sebagai pemekaran dari Kabupaten Ngada. Hal ini sesuai dengan putusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Nagekeo Sebagai Daerah Otonom. Lihat dalam <https://nagekeokab.go.id/sejarah-kabupaten-nagekeo/>.

¹⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

ditetapkan secara sepihak oleh Pemda Nagekeo, yakni di Lowose¹⁷ tanpa melibatkan masyarakat serta tokoh-tokoh adat setempat. Selain itu, proyek pembangunan waduk tersebut diperkirakan akan menghabiskan 431.91 hektar lahan, termasuk di dalamnya terdapat pemukiman atau kampung adat, tempat pelaksanaan ritual keagamaan, fasilitas pendidikan, kuburan para leluhur dan lahan pertanian produktif milik masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dari generasi ke generasi.¹⁸

Atas dasar itulah, masyarakat di tiga desa adat tersebut menolak pembangunan Waduk Lambo. Meskipun demikian, terdapat kelompok masyarakat yang mendukung pembangunan Waduk Lambo. Kelompok tersebut berasal dari Lembaga Pemangku Adat (LPA) Labokawa, Desa Labolewa. Mereka beranggapan bahwa pembangunan Waduk Lambo akan mendatangkan kesejahteraan bagi orang banyak.¹⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya pada dimensi vertikal, yakni antara masyarakat adat dengan pemerintah, melainkan terjadi pula dalam dimensi horizontal yang melibatkan antara kelompok masyarakat adat yang pro pembangunan dengan masyarakat adat yang kontra atau menolak pembangunan Waduk Lambo.

¹⁷ Lowose merupakan salah satu wilayah yang terletak di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

¹⁸ Ebed de Rosery, “Mengapa Pembangunan Waduk Lambo Ditolak Masyarakat di Tiga Desa Adat. Apa Masalahnya?” dalam <https://www.mongabay.co.id/2016/10/31/mengapa-pembangunan-waduk-lambo-ditolak-tiga-desa-adat-apa-masalahnya>, Diakses tanggal 2 Desember 2020.

¹⁹ Arkadius Togo, “Pro dan Kontra Pembangunan Waduk Lambo”, dalam <https://voxntt.com/2019/04/05/pro-dan-kontra-pembangunan-waduk-lambo/43838>, Diakses tanggal 4 Desember 2020.

Berdasarkan fakta di lapangan, masyarakat adat setempat sebenarnya tidak menolak rencana pembangunan Waduk Lambo, hanya saja mereka menolak penetapan nama waduk dengan nama Waduk Lambo. Sebab, lokasi pembangunan waduk, sebagian besar terdapat di Rendu. Sebagian masyarakat adat lainnya yang kontra terhadap pembangunan waduk, memberikan solusi serta pilihan alternatif kepada pemerintah daerah agar lokasi pembangunan waduk dapat dialihkan ke lokasi yang telah disiapkan oleh masyarakat, yakni di wilayah Lowo Pebhu dan Malawaka. Solusi tersebut merupakan kesepakatan bersama yang dihasilkan dalam musyawarah besar (Mubes) antara ketiga komunitas adat, yakni Rendu, Lambo dan Ndora.²⁰ Merespon penolakan tersebut, Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco Do menyampaikan bahwa proyek pembangunan Waduk Lambo akan terus dilanjutkan, meski mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Mengingat bahwa proyek pembangunan Waduk Lambo merupakan proyek strategis nasional sekaligus untuk mengatasi persoalan air bersih di Kabupaten Nagekeo.²¹ Selain itu, proyek pembangunan Waduk Lambo telah memasuki tahapan pelaksanaan, setelah tertunda selama 20 tahun pada tahap perencanaan, dikarenakan adanya penolakan dan intimidasi dari masyarakat adat setempat yang menolak pembangunan.²²

²⁰Arkadius Togo, “Suku Labo Tolak Bangun Waduk Lambo di Lowose”, dalam <https://voxntt.com/2019/03/19/suku-labotolak-bangun-waduk-lambo-di-lowose/43009>, Diakses pada tanggal 3 Desember 2020.

²¹Kornelis Kaha, “Bendungan Lambo Tetap Akan Dibangun di Nagekeo”, dalam <https://www.antaranews.com/berita/1123484/bendungan-lambo-tetap-akan-dibangun-di-nagekeo>. Diakses tanggal 4 Desember 2020.

²² Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, “Sosialisasi Pengadaan Tanah Bendungan Mbay Lambo”, dalam http://sda.pu.go.id/berita/view/sosialisasi_pengadaan_tanah_bendungan_mbay_lambo, Diakses tanggal 4 Desember 2020.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam seputar desain kebijakan yang diformulasikan oleh Pemerintah dalam proses pembangunan Waduk Lambo yang mendapatkan penolakan dan berujung pada terjadinya konflik sosial. Dalam mengkaji masalah tersebut, peneliti menggunakan teori Birokrasi rasional Max Weber dan kritik model inkremental Charles E. Lindblom untuk mengkaji desain kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah, rasional atau inkremental. Sedangkan dalam menganalisis desain kebijakan pembangunan Waduk Lambo, peneliti menggunakan pendekatan analisis kebijakan pluralis Robert Dahl untuk menganalisa tingkah laku para aktor politik dalam proses pembuatan kebijakan dengan serta melihat bagaimana interaksi diantara kelompok kepentingan. Selain itu, analisis pluralis dapat memetakan kelompok-kelompok kepentingan atau *pressure group* dalam mempertahankan kepentingan mereka masing-masing.

Adapun legal akademik yang menjadi dasar pemilihan teori di atas ialah bahwa teori birokrasi rasional Weber merupakan konsep birokrasi yang memiliki seperangkat karakteristik dan teknik paling memuaskan sebagai sebuah organisasi, baik bagi para pemegang otoritas maupun kelompok kepentingan lainnya. Sedangkan kritik model inkremental Charles E. Lindblom dipilih untuk melihat apakah kebijakan pembangunan waduk adalah bagian dari meneruskan kebijakan masa lalu atau kebijakan yang baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Bagaimana desain kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, rasional atau inkremental?
2. Mengapa desain kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah dalam rencana pembangunan Waduk Lambo, gagal mengantisipasi konflik sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sebagaimana telah diuraikan pada rumusan masalah di atas, dapat dinarasikan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan membuktikan desain kebijakan yang diformulasikan dalam kebijakan pembangunan Waduk Lambo.
2. Mengetahui faktor-faktor permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial dalam pembangunan Waduk Lambo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi akademik serta membangun suatu narasi baru yang bertujuan sebagai upaya untuk memahami desain kebijakan di dalam dalam konteks pembangunan infrastruktur yang tidak memunculkan penolakan publik dan konflik sosial. Pembahasan serta pemaparan kompleksitas suatu kebijakan yang diformulasikan melalui sistem birokrasi pemerintahan, baik secara rasional-

komprehensif maupun melalui model inkremental diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya pada taraf pengeimplementasian kebijakan. Sehingga kebijakan dapat diterima oleh semua kalangan dan tidak menimbulkan gejolak dan eskasi konflik di masyarakat.

2. Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi yang konsen dalam bidang analisis kebijakan, khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur. Sebab, kebijakan di sektor pembangunan infrastruktur cukup banyak melahirkan penolakan publik yang berujung pada lahirnya konflik sosial. Oleh sebab itu, analisis kebijakan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar hal-hal yang serupa tidak terulang kembali. Selain bagi para akademisi, diharapkan pula dapat memberi masukan bagi para politisi dan pemangku kebijakan, khususnya di daerah agar dapat memutuskan suatu kebijakan yang adil bagi setiap kelompok, utamanya bagi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan.

Dengan demikian, konflik yang diakibatkan oleh suatu proyek pembangunan dapat dikaji (diteruskan atau dibatalkan), diatasi dan diantisipasi (jika berpotensi melahirkan konflik). Orientasainya adalah agar setiap kebijakan yang diformulasikan dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan suatu hal yang bersifat mendasar atau asasi untuk dilakukan oleh seorang peneliti, baik dalam menentukan posisinya maupun mengedepankan aspek originalitas serta *novelty* atau unsur kebaruan dalam penelitian yang hendak dilakukan. Dari beberapa objek kajian dalam penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang masih memiliki keterkaitan serta relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Pertama, Gjalt de Graaf, Leo Huberts and Remco Smulders (2014) dalam artikelnya dengan judul “*Coping With Public Value Conflicts*”. Fokus penelitiannya terletak pada pola penyelesaian konflik atas nilai-nilai publik yang terjadi pada Pemerintahan Kota Belanda. Penulis menjelaskan bahwa tantangan yang paling mendasar di dalam melayani kepentingan publik adalah menyamakan dan menyeimbangkan persepsi nilai-nilai publik, baik antara para birokrat pemerintahan maupun masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengajukan tiga pertanyaan utama dalam artikelnya yaitu. *Pertama*, apa standar profil nilai publik yang dimiliki oleh para birokrat atau administrator publik?.

Kedua, apa konflik nilai yang dialami. *Ketiga*, bagaimana strategi penanggulangan konflik yang digunakan dalam konteks tersebut? Dalam menjawab pertanyaan di atas, penulis mengajukan enam jawaban mengenai standar nilai publik, yakni integritas, responsif, kinerja yang layak, adanya transparansi atau keterbukaan, akuntabel, dan profesional. Keenam nilai tersebut menjadi dasar dalam menilai kinerja para birokrat yang mendesain

kebijakan. Sebab, keenam nilai tersebut membuat para birokrat sangat berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Selain itu, nilai-nilai di atas melegitimasi para birokrat membuat keputusan yang benar, baik secara moral maupun hukum. Serta memutuskan suatu permasalahan publik berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan profesional mereka. Sedangkan konflik yang dialami dalam permasalahan pelayanan publik terletak pada kinerja atau performa, dan responsibilitas para pembuat kebijakan. Konflik ini muncul karena publik menilai bahwa kebijakan dibuat hanya berdasarkan aturan vertikal yang ditetapkan oleh Dewan Kota, tanpa melihat pada permasalahan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat umum. Padahal Dewan Kota adalah representasi rakyat yang dipilih berdasarkan proses demokrasi partisipatif. Jika keputusan telah dibuat oleh Dewan kota, maka rakyat hanya dihadapkan pada dua situasi dan keadaan yaitu, mengikuti dan menjalankan kebijakan, atau menolak kebijakan. Adapun strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Belanda dalam menanggulangi konflik di atas adalah dengan menggunakan strategi *firewall*, yakni menyerap aspirasi dan pendapat publik terkait nilai-nilai apa yang mereka butuhkan. Artinya ruang-ruang komunikasi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok kepentingan terbuka secara lebar. Tujuannya adalah untuk meminimalkan lahirnya penolakan-penolakan publik atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.²³

²³ Gjalt de Graaf, Leo Huberts and Remco Smulders, “Coping With Public Value Conflicts”, *Administration and Society*, Vol. 48, No. 9 (April 2014).

Kedua, artikel Joram Feitsma (2020) dengan judul “*Rationalized Incrementalism. How Behavior Expert in Government Negotiate Institutional Logic*”. Dalam artikelnya tersebut, Feitsma menemukan bahwa sistem birokrasi pemerintahan Belanda menerapkan model desain kebijakan rasionalis. Namun, pada tataran pengimplementasian kebijakan cenderung mengadopsi spektrum model inkremental. Artinya apa yang dilihat di depan panggung, tidak sama dengan apa yang terjadi di belakang panggung. Sehingga kebijakan publik yang didesain dan dihadirkan ke publik hanya sebagai upaya untuk menyelaraskan citra rasionalis dengan inkrementalis. Feitsma menguraikan bahwa tidak boleh ada hibrida kebijakan dalam bentuk “inkrementalisme rasional”. Sebab, keduanya berlawanan dan seharusnya berada di tempat yang berbeda. Sehingga Feitsma menganalogikannya sebagai ambiguitas yang menjangkiti para aktor kebijakan atau sebagai kemunafikan yang disengaja dan terorganisir. Hal ini tergambar dari bagaimana para aktor kebijakan membangun panggung rasionalis saat mendesain kebijakan. Namun, pada saat yang bersamaan mereka mendialogkannya dengan model inkrementalis. Hal tersebut seolah menandakan jika di kesempatan yang berbeda, mereka terlihat mampu untuk memenuhi tuntutan yang dikehendaki oleh publik, akan tetapi di saat yang berbeda mereka mengadaptasikan tuntutan publik sesuai dengan kebijakan sebelumnya. Praktik organisasi yang demikian mencerminkan bahwa organisasi dihadapkan pada persaingan tuntutan-tuntutan publik. Dan para birokrat berusaha dalam mencari dan menemukan keseimbangan yang bijaksana diantara tuntutan tersebut agar semuanya dapat terpenuhi secara memadai. Jalan

tersebut ditempuh karena para birokrat menyadari bahwa melalui model rasionalis hanya akan melahirkan ketidakpastian dan asumsi. Sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor penentu dalam memetakan solusi serta konsekuensi dari pencapaian dan kemajuan kebijakan sebelumnya.²⁴

Ketiga, artikel David Thacher dan Martin Rein (2004) dengan judul “*Managing value Conflict in Public Policy*”. Dalam artikelnya, Penulis menjabarkan bahwa permasalahan dalam kebijakan publik seringkali ditandai dengan adanya pertentangan nilai-nilai. Adanya konflik tersebut ditanggapi oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyeimbangkan tujuan bersama. Sehingga tujuan para pembuat kebijakan terbagi menjadi dua, yakni membuat kebijakan dan alternatif kebijakan. Terkait dengan perbedaan dan pertentangan nilai dalam kebijakan hanya mengarah kepada pemberian. Analoginya adalah bilamana suatu kebijakan hanya mengandung nilai tunggal yang memiliki relevansi utama dalam kebijakan publik, maka argumen yang disampaikan oleh aktor kebijakan kepada publik ialah bahwa pilihan dan tindakannya merupakan satu-satunya cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, dan publik dituntut untuk membenarkan tindakannya. Namun, jika terdapat beragam nilai dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda, baik pemerintah maupun publik, maka pemerintah, khususnya aktor kebijakan akan kesulitan dalam menjelaskan argumennya terkait dengan keputusan publik. Kendati demikian, penulis berpendapat bahwa meskipun terdapat pertentangan nilai-nilai, aktor

²⁴ Joram Feitsma, ‘Rationalized incrementalism’. How behaviorexperts in government negotiate institutional logics, *Critical Policy Studies*, Vol. 14, No. 2 (2020)

kebijakan dapat menjelaskan bahwa ada standar akhir yang menjadi tujuan bersama sehingga hak dan kewajiban yang bertentangan dapat diintegrasikan dan dipadukan agar dapat meminimalkan konflik. Penulis menyebut hal yang demikian sebagai utilitas. Adapun strategi yang digunakan dalam menanggulangi konflik nilai dalam kebijakan publik, penulis menawarkan tiga metode yakni, *firewall*, bersepeda dan kasuistik. Melalui strategi *firewall*, para aktor kebijakan mendistribusikan tanggung jawab dan gagasan kebijakan pada masing-masing kelompok yang berbeda pandangan sehingga terbentuk pemahaman pada nilai-nilai yang ada. Lalu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengadopsi pandangan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh dan pendukung yang kuat. Adapun strategi bersepeda (*cycling*) menekankan adanya destruktif pada nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan. Kelompok yang mempunyai perbedaan pandangan pada suatu nilai, dibatasi ruang pembahasannya sampai dengan waktu tertentu. Tujuannya adalah mengkonstruksi kembali nilai-nilai tersebut sehingga dapat diperhitungkan kembali. Singkatnya, terdapat jeda pembahasan terkait dengan perbedaan pandangan atas nilai-nilai publik. Keuntungannya adalah membuka ruang inovasi kebijakan yang seimbang diantara nilai-nilai yang berbeda. Sedangkan strategi kasuistik mensyaratkan pejabat publik membuat sebuah keputusan berdasarkan pengalaman mereka ketika menangani kasus yang sama. Model kasuistik mengarahkan membuat kebijakan pada penalaran logis, bukan secara deduktif serta melakukan perbandingan suatu

kasus dengan kasus yang serupa agar keseimbangan dalam konflik nilai dapat tercapai.²⁵

Keempat, Tesis Helenerius Ajo Leda (2018) dengan judul “Strategi Perlawanhan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendu Butowe, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tengga Timur”. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, terdapat tiga pola atau strategi perlawanhan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menolak rencana pembangunan Waduk Lambo di atas areal persawahan atau tanah milik masyarakat. Pertama, strategi yang dilakukan dari bawah, yakni masyarakat setempat merespon rencana pembangunan waduk Lambo dengan melayangkan protes serta keluhannya kepada pemerintah daerah melalui aksi demonstrasi dan memobilisasi massa dalam bentuk aksi telanjang dada, penghadangan saat sosialisasi dan peninjauan lokasi. Tujuannya adalah agar aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Kedua, strategi dari samping yang dilakukan dalam bentuk pelibatan sumber daya eksternal, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik dari daerah maupun luar daerah Kabupaten Nagekeo, serta kelompok atau organisasi mahasiswa. Tujuannya adalah agar dapat memperkuat sumber daya internal masyarakat Rendu Butowe, sehingga tindakan atau aksi yang mereka lakukan memiliki arah yang jelas, serta memiliki tujuan yang terarah dan sejalan, sesuai yang dikehendaki oleh elemen masyarakat. Ketiga,

²⁵ David Thacher dan Martin Rein, “Managing value Conflict in Public Policy”, *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, Vol. 17, No. 4 (October 2004)

strategi dari atas yang dilakukan dalam bentuk negosiasi dan melobi para pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan dalam pembangunan Waduk Lambo. Tujuannya adalah agar aspirasi serta tuntutan mereka dapat didengar dan tersalurkan, sehingga rencana pembangunan Waduk Lambo dapat dibatalkan. Ketiga strategi di atas merupakan wujud atau manifestasi penolakan masyarakat Rendu Butowe secara kolektif terhadap rencana pembangunan Waduk Lambo. Pembangunan Waduk Lambo merupakan kelanjutan dari Proyek Waduk Mbay yang sempat tertunda pembangunannya sejak tahun 2001. Namun, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengusulkan kepada Pemerintah pusat agar rencana pembangunan waduk tersebut dilanjutkan. Adapun latar belakang aksi penolakan yang diinisiasi oleh masyarakat Rendu Butowe dan kelompok eksternal terhadap rencana pembangunan waduk adalah karena masyarakat yang bermukim di lokasi atau areal calon genangan air pembangunan waduk, terancam akan kehilangan tempat tinggal dan lahan pertaniannya. Implikasi terburuknya adalah mereka akan kehilangan sumber penghidupan dan mata pencahariannya yang bersumber dari sektor pertanian.²⁶

Kelima, Tesis Taheta Jaya Maleh (2015) yang berjudul “Urgensi Kepentingan Umum, Model Kompensasi dan Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia (Analisis Isi Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan

²⁶ Helenerius Ajo Leda. *Strategi Perlawanan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Tesis (Yogyakarta: Program Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, 2018)

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Dari hasil penelitiannya ditemukan beberapa persoalan dalam UU No. 2 Tahun 2012 terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan yang sangat paradoks. Di satu sisi, UU tersebut berupaya untuk melindungi hak-hak rakyat yang terkena imbas pembangunan melalui pendekatan ekonomi berupa pemberian kompensasi yang sesuai, dan pendekatan hukum berupa metode litigasi atau penyelesaian sengketa dimuka pengadilan bagi pihak-pihak yang terkait. Namun, di sisi yang lain pemerintah masih gencar melakukan pembangunan yang menyerobot lahan dan tanah milik masyarakat, demi memberikan ruang dan kuasa bagi pihak swasta untuk berinvestasi. Persoalan pembangunan dengan pengadaan tanah yang cukup besar di tengah ketersediaan tanah yang semakin berkurang dan menipis, menjadi sebuah permasalahan yang cukup dilematis. Disaat masyarakat yang berstatus sebagai pemilik tanah, memerlukan tanah untuk memenuhi dan menjamin kebutuhannya sehari-hari, mereka dihadapkan kepada suatu keadaan dan kenyataan bahwa lahan dan tanah mereka akan diambil alih oleh pemerintah, guna menunjang pembangunan. Adapun model kompensasi atau biaya ganti rugi terhadap masyarakat yang tanah atau lahannya terdampak pembangunan, masih berorientasi pada aspek fisik ekonomis berupa uang tunai. Sedangkan aspek non-fisik yang bersifat filosofis dan sosiologis, seperti lingkungan dan relasi sosial masyarakat yang telah terjalin sejak lama serta adat dan kebudayaan warisan leluhur mereka, belum diperhatikan secara maksimal oleh pemerintah. Persolan-persoalan itulah yang dianggap belum memberikan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa UU No. 2

Tahun 2012 yang dibuat oleh pemerintah belum dapat mengaktualisasikan fungsi-fungsi sosial atas tanah dan masih mengedepankan keinginan para investor dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Sehingga pemerintah perlu merumuskan dan memberikan definisi yang konkret mengenai tujuan kepentingan umum, agar tidak hanya berorientasi pada bisnis semata. Selain itu, peneliti memberikan masukan serta saran agar lebih mengedepankan metode dan pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian konflik pertanahan dengan melihat secara komprehensif berbagai kepentingan masyarakat, daripada menempuh jalur litigasi.²⁷

Keenam, Tesis Maria Christina Dodalwa (2019) dengan judul “Komunikasi Krisis Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo (Kasus Resistensi Masyarakat Terdampak Terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Lambo)”. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa penolakan rencana pembangunan Waduk Lambo disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, faktor internal yang meliputi pendekatan komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo tidak efektif. Menurutnya, jika pada awalnya pendekatan yang dikedepankan oleh pemerintah adalah pendekatan budaya, serta lokalitas, maka penolakan pembangunan waduk tidak akan terjadi. Mengingat bahwa kondisi psikologis masyarakat adat yang belum dapat memahami secara komprehensif istilah-istilah teknis dalam suatu pembangunan. Selain itu,

²⁷ Taheta Jaya Maleh. “*Urgensi Kepentingan Umum, Model Kompensasi dan Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia (Analisis Isi Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)*”. Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015)

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak melibatkan kelompok masyarakat yang menolak pembangunan, akan tetapi hanya mengakomodir kelompok yang mendukung pembangunan. Hal tersebut semakin diperparah dengan ketiadaan transparansi informasi dari pemerintah. *Kedua*, faktor eksternal. Salah satu yang menjadi argumen dasar masyarakat menolak pembangunan Waduk Lambo dikarenakan pembangunan tersebut akan menghilangkan tempat tinggal dan pemukiman, tempat pelaksanaan ritual keagamaan, kuburan para leluhur, sekolah dan lahan pertanian milik masyarakat adat setempat. Atas dasar itulah, rencana pembangunan waduk tersebut mengalami kendala sejak tahun 2001 hingga saat ini.²⁸

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas sebagai kajian pustaka, peneliti menemukan kesamaan dari dua akademisi yang mengkaji tentang konflik sosial dalam pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, sebagai objek materialnya. Kendati demikian, objek formal yang dilakukan oleh kedua akademisi tersebut berbeda dengan objek formal yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Penelitian Maria Christina Dodalwa menggunakan teori atribusi dan teori *situational of crisis communication* sebagai objek formalnya dalam mengkaji komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam mensosialisasikan rencana pembangunan Waduk Lambo kepada masyarakat adat yang terdampak pembangunan. Demikian pula dalam penelitian Helenerius

²⁸ Maria Christina Dodalwa. *Komunikasi Krisis Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo (Kasus Resistensi Masyarakat Terdampak Terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Lambo)*. Tesis (Semarang: FISIPOL Universitas Diponegoro, 2019)

Ajo Leda yang menggunakan konsep strategi tindakan/aksi kolektif dalam menganalisis pola perlawanan Masyarakat Rendu Butowe terhadap rencana pembangunan Waduk Lambo. Sedangkan objek formal yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis dasar penolakan Masyarakat adat di Desa Rendu Butowe, Ulupulu dan Lebolewa terhadap rencana pembangunan Waduk Lambo adalah dengan menggunakan konsep Birokrasi Weber untuk menelaah dan mengkaji mengapa desain kebijakan yang diformulasikan dalam pembangunan Waduk Lambo memunculkan penolakan dan konflik sosial. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan analisis kebijakan pluralis untuk memotret usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam mempertahankan kepentingannya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang mempelajari berbagai objek, baik dari segi gejala maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dialami oleh masyarakat.²⁹ Dengan kata lain, peneliti dituntut agar terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari serta mengumpulkan dan mengelompokkan data-data atau abstraksi yang berkaitan dengan permasalahan seputar konflik sosial dalam pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo. Dan dari data yang telah diperoleh,

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dengan demikian, maka peneliti dapat mengetahui dan mengaplikasinya secara objektif.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dirancang di dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Secara umum, pertanyaan penelitian dalam studi kasus berkenaan dengan “bagaimana” atau “mengapa”, yang menuntut peneliti agar dapat memperoleh pengetahuan yang eksploratif dan eksplanatif dalam menyelidiki suatu fenomena yang terjadi. Sehingga dengan demikian, maka penelitian studi kasus dipandang sangat tepat untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dari gejala atau fenomena yang sedang dikaji.³⁰ Penelitian studi kasus menggunakan paradigma post-positivistik untuk mengangkat sebuah permasalahan yang memiliki objek kajian tertentu sebagai sebuah kasus, agar dapat dikaji secara mendalam, dan dapat digali informasinya dari sumber utamanya. Sehingga realitas yang berada dibalik suatu fenomena yang tidak terlihat dapat dibongkar.³¹ Dengan kata lain, studi kasus merupakan suatu proses dalam memahami atau mengkaji suatu fenomena atau kasus sekaligus mencari hasilnya sesuai dengan data dan bukti di lapangan.

³⁰ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, cet. ke-16, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 24.

³¹ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 12.

Tujuan penggunaan studi kasus dalam konteks penelitian ini adalah sebagai batu loncatan dalam memahami, mengurai serta menyingkap beragam permasalahan di sektor pembangunan infrastruktur yang menuai pro-kontra dari masyarakat dan berujung pada terjadinya konflik sosial, khususnya pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, yang mendapatkan resistensi atau penolakan dari Masyarakat Adat Rendu, Ulupulu dan Labolewa.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang disajikan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti bahwa data yang diperoleh merupakan data non-statistik. Adapun sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi, dibagi dalam dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data yang dijadikan bahan informasi dalam penelitian ini terbagi dalam tiga komponen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*). Adapun komponen yang pertama, yakni tempat merupakan komponen penelitian yang menjadi lokasi diperolehnya suatu data atau informasi. Dalam hal ini, Desa Rendu Butowe merupakan lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan seputar desain kebijakan yang diformulasikan dalam pembangunan Waduk Lambo yang menuai polemik penolakan atau resistensi dari masyarakat setempat.

Komponen kedua yakni aktor. Peneliti berupaya menggali beragam informasi seputar desain kebijakan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo terkait pembangunan Waduk Lambo. Adapun aktor kebijakan dan birokrat daerah yang dipilih oleh peneliti sebagai sumber data adalah:

1. Wakil Bupati Nagekeo periode 2018-2023, Marianus Waja;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bernard Dinus Fansiena;
3. Mantan Anggota DPRD Nagekeo sekaligus Ketua Yayasan Masyarakat Adat Rendu (YAPMAR), Fransiskus Sina yang pernah terlibat dalam pengusulan pembangunan Waduk Lambo di era pemerintahan Bupati Elias Djo.

Selain itu, peneliti menemukan beberapa informan di lapangan yang potensial dalam memberikan masukan dan informasi kepada peneliti terkait pembangunan Waduk Lambo, diantaranya ialah:

1. Ketua Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), Bernadinus Bau Gaso;
2. Masyarakat Adat Rendu yang pro pembangunan Waduk, Amandus Watu;
3. Masyarakat Adat Rendu yang kontra pembangunan waduk, Siti Aisyah.

Pemilihan responden atau informan dalam penelitian ini, sebagaimana diuraikan di atas, menggunakan dua teknik. *Pertama*, teknik *purposive sampling* yakni peneliti telah menentukan sampel yang dijadikan sebagai sumber data dengan pertimbangan tetentu agar memudahkan peneliti selama berlangsungnya penelitian. *Kedua*, teknik *snowball sampling*, yakni peneliti menyeleksi berbagai informan yang potensial, kredibel dan memiliki kapasitas masing-masing dibidangnya, baik dari tokoh masyarakat, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tujuan dari pemilihan responden dengan menggunakan kedua teknik tersebut adalah agar dapat diperoleh informasi yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan penelitian.

Komponen ketiga yakni aktivitas. Dalam konteks ini peneliti nantinya akan melihat sejauh mana proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan waduk dan menelaah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat dalam melakukan advokasi serta perlawanan dalam memperjuangkan hak-haknya.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak yang lain, baik berupa tesis, disertasi, artikel, berita online, maupun laporan penelitian lainnya yang masih memiliki hubungan atau relevan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar mempermudah rangkaian dari proses penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan diuraikan sebagai berikut;

a. Wawancara

Penggunaan metode wawancara bertujuan untuk mengetahui akar permasalahan dengan menggali informasi dari responden baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak, terhadap suatu fenomena yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pola wawancara terstruktur. Wawancara mendalam dapat dipahami sebagai sebuah pola komunikasi tatap muka yang dijalankan secara intens antara peneliti dengan informan atau responden di lapangan, dalam waktu yang cukup lama dan dilakukan berkali-kali.³²

Dalam wawancara tersstruktur, peneliti telah membuat dan merancang pedoman wawancara agar pada tahapan pelaksanaan wawancara di lapangan dapat diperoleh informasi yang jelas, mendalam dan terarah, sesuai dengan topik dan fokus pembahasan peneliti, serta tidak menyimpang dari tujuan utama penelitian.³³ Meskipun demikian, pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam menggali

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 111.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 195.

informasi seputar desain kebijakan pembangunan Waduk Lambo, tidak diaplikasikan secara kaku atau hanya berdasarkan pada pedoman belaka. Melainkan selama berlangsungnya proses wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan lainnya yang tidak tercantum dalam pedoman wawancara, bilamana ditemukan sebuah informasi atau isu-isu penting yang menjadi perhatian peneliti.

Sedangkan kendala yang ditemukan oleh peneliti dalam melaksanakan proses dan tahapan wawancara di lapangan, ada beberapa informan yang enggan diwawancarai, bahkan menolak untuk memberikan informasi. Salah satu alasannya adalah karena segala informasi seputar pembangunan waduk telah dibicarakan di forum. Sehingga solusi yang ditawarkan kepada peneliti adalah diarahkan untuk mencari informasi ke ketua forum penolakan pembangunan waduk. agar setiap informasi diperoleh melalui satu pintu. selain itu, ada informan lain yang menolak untuk diungkap identitasnya dalam penelitian ini. Sehingga peneliti tidak mencantumkan namanya. Alasannya adalah khawatir akan memberikan informasi yang keliru atau tidak benar kepada peneliti, sebagaimana yang telah dibicarakan dalam forum.

b. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati berbagai gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan agar dapat diperoleh data yang akurat dan menunjang keberhasilan suatu penelitian. Adapun

kegiatan observasi yang digunakan oleh peneliti di lapangan adalah observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat langsung dan berperan serta dalam aktifitas kehidupan masyarakat yang menjadi objek pengamatan serta topik penelitiannya. Peran yang dimainkan oleh peneliti dalam observasi partisipan diklasifikasikan dalam dua bagian. *Pertama*, berperan sebagai bagian dari anggota peserta dalam kehidupan masyarakat dan terlibat dalam berbagai aktifitas dan perasaan mereka. *kedua*, berperan sebagai peneliti yang mengamati pola dan perilaku masyarakat agar diperoleh data yang akurat serta kesesuaian informasi yang telah diperoleh sebelumnya.³⁴

Dalam konteks penelitian ini, peneliti telah berpartisipasi dan terjun langsung di Desa Rendubutowe sebagai salah satu dari tiga desa yang terdampak pembangunan waduk. Waktu pelaksanaan observasi dilaksanakan pada bulan Januari – hingga Awal Maret tahun 2021 untuk melihat dan mengamati berbagai rangkaian dari proses pembangunan Waduk Lambo, khususnya proses pengukuran lahan untuk pembangunan dan proses sosialisasi rencana pembangunan waduk, di lokasi yang terdampak, yakni di Lowose, Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan. Selain itu, peneliti turut mengamati secara langsung upaya-upaya persuasif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam mencegah terjadinya konflik sosial sebagai

³⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 39.

buntut dari resitensi atau penolakan masyarakat adar terhadap pembangunan Waduk Lambo.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis, dan berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif.³⁵ Adapun yang menjadi fokus peneliti dalam menggali informasi seputar desain formulasi kebijakan melalui dokumen-dokumen, baik dokumen yang berkaitan dengan kajian analisis dampak lingkungan (Amdal), Peraturan Perundang-undangan, baik Peraturan Presiden maupun Peraturan Daerah, dokumen proses sosialisasi pembangunan, hingga tahapan pelaksanaan, hasil survei, dan berbagai dokumen lainnya yang masih memiliki keterkaitan dan menunjang keberhasilan dari penelitian ini. Karena tingkat kredibilitas suatu penelitian ditentukan pada penggunaan serta pemanfaatan dokumen.

5. Teknik Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti memeriksa derajat kredibilitas (tingkat keprcayaan) dengan menggunakan teknik triangulasi³⁶ untuk mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi

³⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 177.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 327.

sumber dan teknik. Triangulasi sumber berfungsi menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk mengecek kredibilitas data dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda agar diperoleh sebuah data dari sumber yang sama. Misalnya data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam lalu diuji dengan metode observasi terhadap suatu masalah di lapangan.³⁷

Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, peneliti berusaha untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan seputar desain kebijakan pembangunan waduk serta pemicu konflik sosial dari berbagai informan dengan berbagai macam teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Sehingga dapat diperoleh sebuah data yang bisa diverifikasi kebenarannya.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, baik selama berlangsungnya suatu penelitian hingga usai agar data yang diperoleh berada pada tingkatan data jenuh, peneliti menggunakan Teknik Analisis data Miles and Huberman, yang mencakup aspek reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.³⁸ Data jenuh adalah konsistensi jawaban dari berbagai informan terhadap suatu pertanyaan. adapun tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan..*, 373.

³⁸ *Ibid*, 337.

a. Reduksi Data

Selama berlangsungnya pengumpulan data, peneliti dituntut untuk mereduksi data dengan cara membuat sebuah ringkasan atau abstraksi, memilih dan memilih dari berbagai koleksi data yang ditemukan di lapangan selama penelitian berlangsung, serta difokuskan pada hal-hal penting yang menjadi inti atau objek penelitian sehingga menjadi suatu tulisan yang dapat dianalisis.

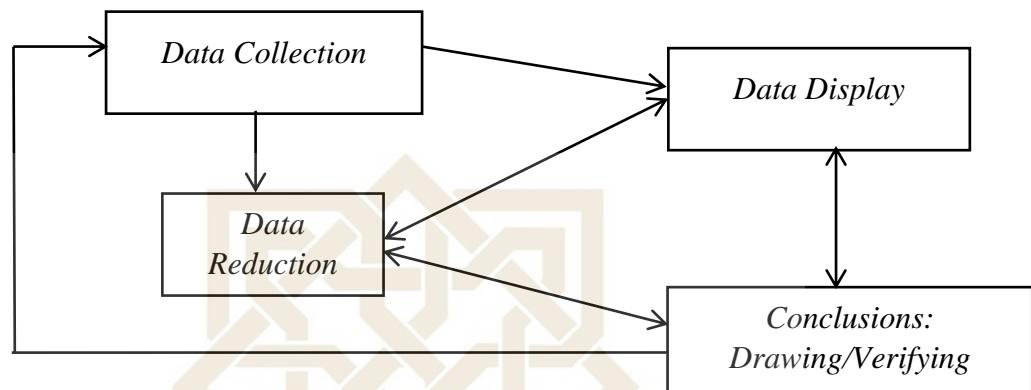
b. Penyajian Data

Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti setelah mereduksi data adalah menyajikan temuan data dalam bentuk teks deskripsi yang bersifat naratif dan sistematis. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti untuk menemukan makna dalam mengkaji serta mengulas tema sentral yang menjadi fokus pembahasan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sejak awal.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Pada tahapan ini, peneliti dituntut untuk mencari suatu pola, bentuk, hubungan atau keterkaitan serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi hasil analisis data sebagai langkah awal dalam membuat suatu kesimpulan. Data-data yang telah diperoleh, diuji dan dibandingkan antara satu sama lain agar dapat ditarik sebuah kesimpulan yang tepat dan akurat dalam menjawab permasalahan yang ada.

Berikut bagan model teknik analisis data secara interaktif menurut Miles dan Huberman:³⁹



Gambar 1.
Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)



³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan..*, 338

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan kemudahan mengenai deskripsi atau gambaran umum dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikannya lebih lanjut dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi tentang studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Cakupannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini memaparkan tentang kerangka teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar atau acuan dalam menganalisa serta memetakan permasalahan dalam penelitian yang hendak dilakukan. Teori yang digunakan berkaitan dengan konsepsi Birokrasi Weberian dan sub-sub pembahasan berupa model kebijakan rasional-komprehensif dan kritik inkremental. Selain itu dipaparkan pula mengenai konsep analisis kebijakan pluralis Robert Dahl serta anatomi konflik sosial.

BAB III: Bab ini memuat data penelitian yang berisi tentang kondisi wilayah geografis dan demografis masyarakat Adat Desa Rendu Butowe di Kabupaten Nagekeo, yang terdampak pembangunan Waduk Lambo, serta profil rencana pembangunan waduk.

BAB IV: Bab ini menguraikan tentang data penelitian yang menjadi hasil temuan di lapangan, sekaligus sebagai hasil dari mendialogkan antara teori birokrasi dengan fakta lapangan, khususnya mengenai desain kebijakan pembangunan Waduk Lambo dan kelompok-kelompok yang terlibat di

dalamnya, dianalisis melalui pendekatan kebijakan pluralis Robert Dahl, serta pemaparan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya penolakan publik dan konflik sosial dalam pembangunan waduk tersebut

BAB V: Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang mencakup kesimpulan atau hasil akhir penelitian serta beberapa saran penelitian untuk tindak lanjut ke depan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari kajian dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai “Pembangunan, Kelompok Kepentingan dan Konflik: Analisis Pendekatan Pluralis dalam Desain Kebijakan Pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur”, peneliti menyimpulkan bahwa: *Pertamq*, landasan implementasi kebijakan pembangunan Waduk Lambo adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dijadikan sebagai legal rasional atau pedoman oleh aparat birokrasi. Peneliti menemukan adanya rantai otoritas dalam birokrasi yang berada di balik rencana pembangunan Waduk Lambo, yakni Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Pusat yang memiliki keterkaitan dan pengaruh satu sama lain dalam menganyam tata pemerintahan lintas sektor. Macetnya tata pemerintahan di daerah dalam menangani masyarakat yang terdampak pembangunan, menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengalihkan proyek pembangunan Waduk Lambo ke pemerintah pusat sebagai pemangang otoritas tertinggi. Agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Kedua, realitas desain kebijakan yang diimplementasikan dalam formulasi pembangunan Waduk Lambo mencerminkan model rasional

komprehensif. Sebab, dalam model rasional, seluruh pertimbangan dalam memaksimalisasi keuntungan sosial (*maximum social gain*). Demikian pula dalam pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, telah melewati rangkaian proses dan waktu yang cukup lama dan panjang. Baik dari proses kajian di lapangan, tahapan sosialisasi, perumusan potensi positif pembangunan waduk, proses pembebasan lahan dan lain-lain. Hasil kajian tim lapangan menunjukkan bahwa kehadiran Waduk Lambo sangat berkontribusi tidak hanya dalam sarana irigasi pertanian masyarakat, melainkan untuk sarana Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PLTM), dan menjadi salah satu destinasi wisata untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nagekeo.

Ketiga, kelompok kepentingan yang terlibat dalam rencana pembangunan Waduk Lambo terdiri dari dua kelompok, yakni pemerintah daerah dan masyarakat adat di tiga desa terdampak pembangunan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo adalah berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dalam melanjutkan pembangunan waduk. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh masyarakat adat yang menggandeng Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah mempengaruhi pemerintah pusat dalam menggagalkan lokasi pembangunan waduk di Desa Rendubutowe, Desa Labolewa, dan Desa Ulupulu. Dan meminta agar lokasi pembangunan waduk dialihkan ke tempat lain, yakni Malawaka atau Lowophebu. Namun, pilihan yang direspon oleh pemerintah pusat adalah melanjutkan pembangunan waduk sesuai dengan lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Keempat, Konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah berlangsung dalam dimensi vertikal (atas-bawah) dan dalam bentuk konflik terbuka. Sebab, aksi-aksi penolakan masyarakat telah masif dilakukan oleh mereka, baik demonstrasi, penolakan saat akan dilakukan pengukuran lahan dan lain-lain. Faktor yang memicu terjadinya konflik adalah karena model desain kebijakan rasional komprehensif yang kaku dan tidak fleksibel dalam merespon keinginan dan tuntutan masyarakat adat yang memperjuangkan leluhur, tanah adat, makam para leluhur dan lahan pertanian mereka sebagai satu-satunya sumber penghidupan mereka. Selain itu, langkah dan upaya mereka sebagai komunitas adat akar rumput dalam menolak pembangunan waduk mendapatkan dukungan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sehingga sampai dengan saat ini mereka gigih memperjuangkan hak-haknya sebagai pemilik yang berkuasa atas wilayah hutan adat, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35.

B. Saran

Terkait dengan saran yang dapat peneliti kemukakan dalam konteks penelitian ini, diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pemerintahan, baik di daerah maupun provinsi yang memiliki kewenangan atau otoritas dalam mengelola daerahnya, diharapkan agar dapat membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tentunya dengan mempertimbangkan aspek positif maupun negatif yang akan terjadi di kemudian hari. Sebab, proses pembangunan memiliki tujuan untuk

mensejahterakan masyarakat, bukan mengesklusi hak-hak masyarakat tentunya dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya.

2. Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah, khususnya dalam pembangunan dapat didesain secara dinamis dengan melihat berbagai hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah. Agar ke depannya tidak lagi memunculkan konflik terbuka dalam dimensi vertikal antara pemerintah dengan masyarakat.
3. Bagi masyarakat yang terdampak pembangunan, utamanya bagi masyarakat yang berada di tiga desa di atas, agar diperhatikan oleh pemerintah, baik daerah kabupaten, provinsi, maupun pusat, khususnya pasca pembangunan waduk. Mengingat, sebagian besar profesi masyarakat adalah petani yang lahannya dikorbankan dan direlakan untuk pembangunan waduk. Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus agar kedepannya kondisi sosial dan ekonomi mereka jadi jauh lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anderson, James. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company, 2003.

Albrow, Martin. *Birokrasi*, Cet. Ketiga. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik: Pengantar*, Cet. Ke-2 Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Abdoellah, Awan Y. dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Blau, Peter M. and Marshall W. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: UI Press, 1987

C. Mills, Wright *The Power Elites*. New York: Oxford University Press, 1956.

Cairney, Paul. *Understanding Public Policy: Theories and Issues*. London: Red Globe Press, 2019.

Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, 2010.

Dodalwa, Maria Christina. *Komunikasi Krisis Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo (Kasus Resistensi Masyarakat Terdampak Terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Lambo)*. Tesis. Semarang: FISIPOL Universitas Diponegoro, 2019.

DuBois, Brenda and Karla Krogssurd Miley. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon, 1992.

Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dean, Pruitt G. and Rubin Z. Jeffrey. *Teori Konflik Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Rencana Strategis 2020-2024*

Effendi, Bachtiar. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Etzioni, Halevy Eva. *Demokrasi dan Birokrasi “Sebuah Dilema Politik”*. Yogyakarta: Total Media, 2011.

Eade, Deborah. *Capacity-building: An Approach to People-centred Development*. United Kingdom: Oxfam, 1997.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Heywood, Andrew. *Political Theory: An Introduction*. London: Palgrave Macmillan, 2012.

Hidajah, Siti Hidajatul. *Birokrasi dan Pembentukan Civil Society*, Surabaya: Pukad-Hali, 2004.

Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Pastisipasi*. Bogor: Ghalia Indah, 2014

Hara, Abubakar Eby. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri*. Bandung: Nuansa, 2011.

Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Indahono, Dwiyanto. *Public Disobedience: Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebojakan Pemerintah*. Yogyakarta: Gava Media, 2009.

Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Gorontalo: UNG Press, 2015.

Kuncoro, Mudrajad. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

Leda, Helenerius Ajo. *Strategi Perlawanan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Tesis. Yogyakarta: Program Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, 2018.

Lindblom, Charles E. *The Intelligence of Democracy*. New York: Free Press, 1965.

Limbong, Bernhard. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014.

Luthans, F. *Organizational Behaviour*. New York: McGraw Hill Publishing Company, 1973.

Lucian, W. Pye. *Participation and Authority*, dalam “The Citizen and Politic: A Comparative. Stanford: Grey Look, 1978.

Lester, James P. and Joseph Steward Jr., *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth, 2000

Marx, Martin. *The Administrative State*. Chicago: Chicago University Press, 1957.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Maleh, Taheta Jaya. “*Urgensi Kepentingan Umum, Model Kompensasi dan Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia (Analisis Isi Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)*”. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

Mas'oed, Mohtar. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Meutia, Intan Fitri. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA, 2017.

Nasution, Zulkarimen. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara berkembang*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015.

Otomar, Bartos J and Paul Wehr. *Using Conflict Theory*. Cambridge University Press, 2002.

Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Robert Gurr, Ted. *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts*. Washinton D.C.: United State Institute of Peace Press. 1993.

Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Suryono, Agus. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Soeharto, Edi . *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, 2008.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2015.

Susan, Novri. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

_____. *Sosiologi Konflik, Teori-Teori dan Analisis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Simon, Roger. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Insist Bekerjasama Dengan Pustaka Pelajar, 2004.

Simon, Herbert. *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*. New York: Palgrave Macmillan, 1965

Suryadi, Syamsu. Indonesia dan Komunikasi Politik, dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (ed). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Suryono, Agus. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Sawir, Muhammad. *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.

Santoso, Priyo Budi. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Setiyono, Budi. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung: Nuansa, 2012.

Said, M. Mas'ud. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press, 2010.

Sharkansy, Ira. *Public Administration: Making in Government Agencies*. Chicago; rand McNally College Publishing, 1975

Turner, Bryan S. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012.

Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

_____. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

_____. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2011.

_____. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tri Sakti, Fadjar. *Morfologi Birokrasi*. Bandung: FISIP Universitas Pasundan, 2020.

Trijono, Lambang. *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Todaro, Michael Paul. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Vroom, C. W. *Pembangunan Organisasi: Sebuah Telaah Ulang Tentang Tesis Birokrasi Patrimonial-Rasional di Asia*. Jakarta: Prisma 6 LP3ES, 1982.

Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Free Pers, 1947.

Widodo, Joko. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia, 2007.

Weimer, David L. & Aidan R Vining. *Policy Analysis, Concept, and Practice*. New Jersey: Practice Hall, 1998.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.

Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, cet. ke-16. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Yuwono, Teguh. *Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (PUSKODAK) UNDIP, 2001.

Jurnal

Almond, Gabriel A. and G. Bingham Powell, "Comparative politics: A Developmental Approach". *The Journal of Politics*. Vol. 29, No. 4 (November 1967)

Agussalim, Dafri "Menelusuri Perdebatan Mengenai Konsep Kekuasaan". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 3 (Maret 1998)

Benditt, Theodore M. "The Concept of Interest in Political Theory". *Political Theory*. Vol. 3, No. 3 (Agustus 1975), hlm. 252. doi:[10.1177/009059177500300302](https://doi.org/10.1177/009059177500300302)

Biga, Mahyudin "Kebijakan-Kebijakan dalam Organisasi Birokrasi Modern", *Jurnal legalitas*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2009)

Feitsma, Joram. 'Rationalized incrementalism'. How behaviorexperts in government negotiate institutional logics, *Critical Policy Studies*, Vol. 14, No. 2 (2020)

Firmansyah, M. "Perdebatan Teori Rasionalitas dalam Menjelaskan Terbentuknya Biaya Transaksi pada Seleksi Pegawai Negeri". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 13, No. 1 (Juli 2012)

Gajduschek, Gyorgy. "Bureaucracy: is it Efficient? Is it Not? Is That The Question? Uncertainty Reduction: An Ignored Element of Bureaucratic Rationality". *Administration & Society*, Vol. 34 No. 6 (January 2003)

Graaf, Gjalt de. Leo Huberts and Remco Smulders, "Coping With Public Value Conflicts", *Administration and Society*, Vol. 48, No. 9, (April 2014).

Hutagalung, Daniel. "Batas dan Kemungkinan Demokrasi: Gagasan Poliarkhi Robert Dahl", *Konfrontasi Journal: Culture, Economy and Social Changes*, Vol. 8, No. 1 (Januari 2018)

Irwandi, Endah R. Chotim, "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta; Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung", *JISPO*, Vol. 7, No. 2 (2016)

Kadir, Hatib Abdul. "Komparasi Munculnya Liberalisme Ekonomi di Indonesia dan Burma". *Lembaran Sejarah*, Vol. 13, No. 2 (Oktober 2017)

Leoveanu, Andy Constatin. "Rationalist Model in Public Policy". *Jurnal of Public Administration, Finance and Law*, Vol. 4 (2013)

Muaidi, Sholih. Ismail MH, dan Ahmad Sofwani, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik*, Vol. 06, No. 02 (Desember 2016)

Maryaningsih, Novi Oki Hermansyah dan Myrnawati Savitri, " Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 17, No. 1 (Juli 2014)

Mawardi, Ahmad Imam "Charles Wright Mills dan Teori Power Elite: Membaca Konteks dan Pemetaan Teori Sosiologi Politik Tentang Kelas Elite Kekuasaan", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol. 4, No. 2, (Desember 2019)

Maiwan, Mohammad. "Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik", *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 15, No. 2 (April 2016)

Paskarina, Carolien. "Menundukkan Birokrasi: Melacak Pertarungan Kuasa Dibalik Wacana Reformasi Biorkrasi", *COSMOGOF Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (April, 2015)

Rohilie, Haunan Fachry. "Merancang Masa Depan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Menciptakan Birokrasi yang Responsif." *Jurnal Transformative*, Vol. 1, No. 2 (September 2015)

Thacher, David dan Martin Rein, "Managing value Conflict in Public Policy", *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, Vol. 17, No. 4 (October 2004)

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 *Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur* Pasal 1 ayat (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (1) dan (2)

Internet

Ahmad, Adiana. "Gubernur NTT Minta Masyarakat Rendu dan Lambo Dukung Waduk Lambo", dalam <https://kupang.tribunnews.com/2017/04/22/gubernur-ntt-minta-masyarakat-rendu-dan-lambo-dukung-waduk-lambo>, diakses tanggal 20 Februari 2021.

Anwar, Ilham Choirul. "Perbedaan Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Jumlahnya Tahun 2020", dalam <https://tirto.id/perbedaan-tenaga-kerja-angkatan-kerja-dan-jumlahnya-tahun-2020-f7CC>, diakses tanggal 20 Januari 2021.

Arief, Andi M. "Bendungan Mbay di NTT Mulai Dibangun Awal 2021", dalam

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210112/45/1341988/bendungan-mbay-di-ntt-mulai-dibangun-awal-2021>, diakses tanggal 28 Februari 2021.

Asmara, Candra Gian. "Bendungan Banyak Dibangun, Jokowi: Saya Yakin NTT Makmur", dalam

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210223173109-4-225591/bendungan-banyak-dibangun-jokowi-saya-yakin-ntt-makmur>, diakses tanggal 27 Februari 2021.

Arti Kata Pembangunan, dalam
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembangunan>, diakses tanggal 30 November 2020.

Bere, Sigiranus Marutho "Dugaan Korupsi Pelepasan Aset Tanah, Mantan Bupati Nagekeo Ditahan", dalam
<https://regional.kompas.com/read/2018/03/20/07531461/dugaan-korupsi-pelepasan-aset-tanah-mantan-bupati-nagekeo-ditahan>, diakses tanggal 1 Maret 2021.

Berita Satu, "KPU NTT Tetapkan Elias-Paul Pemenang Pilkada Nagekeo", dalam <https://www.beritasatu.com/nasional/141497/kpu-ntt-tetapkan-eliaspaul-pemenang-pilkada-nagekeo>, diakses tanggal 1 Maret 2021.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, "Sosialisasi Pengadaan Tanah Bendungan MbayLambo", dalam http://sda.pu.go.id/berita/view/sosialisasi_pengadaan_tanah_bendungan_mbay_lambo, diakses tanggal 4 Desember 2020.

Kaha, Kornelis. "Bendungan Lambo Tetap Akan Dibangun di Nagekeo", dalam <https://www.antaranews.com/berita/1123484/bendungan-lambo-tetap-akan-dibangun-di-nagekeo>. Diakses tanggal 4 Desember 2020.

Laporan Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam <http://kpa.or.id/publikasi/daftar/laporan>, diakses pada tanggal 29 November 2020.

Maharrani, Anindhita dan Dwi Setyo Irawanto, "Bonus Demografi dan Profil Tenaga Kerja Kita", dalam <https://lokadata.id/artikel/bonus-demografi-dan-profil-tenaga-kerja-kita>, diakses tanggal 20 Januari 2021.

Putra, Dion DB. “Nani Aoh, cabup Nagekeo Terpilih”, dalam <http://www.dionbata.com/2008/08/nani-aoh-cabup-nagekeo-terpilih.html>, diakses tanggal 1 Maret 2021.

Rosery, Ebed de. “Mengapa Pembangunan Waduk Lambo Ditolak Masyarakat di Tiga Desa Adat. Apa Masalahnya?” dalam <https://www.mongabay.co.id/2016/10/31/mengapa-pembangunan-waduk-lambo-ditolak-tiga-desa-adat-apa-masalahnya>, diakses tanggal 2 Desember 2020.

Togo, Arkadius. “Pro dan Kontra Pembangunan Waduk Lambo”, dalam <https://voxntt.com/2019/04/05/pro-dan-kontra-pembangunan-waduk-lambo/43838>, diakses tanggal 4 Desember 2020.

_____, “Suku Labo Tolak Bangun Waduk Lambo di Lowose”, dalam <https://voxntt.com/2019/03/19/suku-labo-tolak-bangun-waduk-lambo-di-lowose/43009>, diakses pada tanggal 3 Desember 2020.

Zona Line News, “Polemik Waduk Lambo Nagekeo “Warga Salut Pendekatan Gories Mere”, dalam <https://zonalinenews.com/2017/03/polemik-waduk-lambo-nagekeo-warga-salut-pendekatan-gories-mere/>, diakses tanggal 20 Februari 2021.

